PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK

Putri Indah Sari
155100093, 785567921

Fakultas Komputer
Putriindahsari.student@umitra.ac.id

Abstract

Hak merek yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak mendapatkan perlindungan hukum atas sengketa passing off terhadap merek adalah pemakai dan pendaftar pertama atas merek yang digunakan. Merek merupakan salah satu bentuk HKI yang digunakan untuk mengenal serta membedakan produk barang atau jasa. Akan tetapi, merek sangat rentan untuk ditiru oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Adanya peniruan merek seperti passing off berdampak pada kerugian material dan nonmaterial. Terhadap para pelaku pelanggaran hak merek, pemegang hak merek dapat melakukan upaya perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Salah satu upaya hukum yang diterapkan adalah melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Langkah tersebut menghasilkan keputusan yaitu penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang ditiru.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum.

A. INTRODUCTION

Merek dagang di Indonesia semakin banyak macam-macam pilihannya. Teknologi informasi dan komunikasi mendukung perkembangan macam-macam merek yang dikenal oleh masyarakat. Masyarakat dapat mencari informasi keunggulan produk dari merek tertentu sehingga mereka dapat memilih produk yang diinginkan. Oleh karena itu, antarpemilik merek suatu produk akan bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat selaku konsumen. Kondisi inilah yang mendorong terjadinya tindakan persaingan yang tidak tepat seperti pemalsuan atau peniruan merek. Merek yang dibuat oleh pelaku bisnis atau perusahaan bertujuan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Merek dapat disebut sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang berhubungan dengan tujuan pembuatannya. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen. 1 Merek yang dibuat oleh produsen menimbulkan sudut pandang tertentu bagi konsumen.

Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas produk melalui merek. Oleh karena itu, merek yang berkualitas dan dikenal luas oleh konsumen berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta dibajak. 2 Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menjelaskan bahwa peran merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang baik. Merek dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan asal mula produk, mengetahui kualitas produk, serta keaslian produk.³ Dengan demikian, diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek untuk memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat.

Suatu merek menjadi terkenal dan mewujudkan jaminan kualitas dan reputasi suatu produk memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, merek yang telah terkenal akan menjadikan merek tersebut sebagai aset atau kekayaan perusahaan. Akan tetapi, keterkenalan merek tersebut akan mendorong produsen lain untuk menirunya. Persaingan dagang semakin besar sehingga mendorong orang lain melakukan perdagangan dengan jalan pintas (free riding) terhadap

merek terkenal. Tindakan free riding merupakan tindakan yang berusaha untuk membuat, meniru, dan menyamai suatu merek barang atau jasa untuk menumpang keterkenalan suatu merek. Tindakan seperti inilah yang disebut sebagai passing off dengan menggunakan merek dari pihak lain secara melawan hukum. Passing off mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek sesungguhnya seperti menurunnya reputasi perusahaan, omset penjualan yang menurun, dan tuntutan dari konsumen yang merasa tertipu karena kualitas produk tidak sesuai dengan merek aslinya. Merek sebagai karya intelektual memiliki perlindungan hukum sehingga mendorong produsen untuk mencipta dan mengembangkan kreasi masyarakat. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan penanaman modal semakin meningkat serta mendukung iklim investasi. Perlindungan hak atas merek telah diundangkan sejak sebelum kemerdekaan. Undang-undang di bidang merek pertama dilaksanakan pada Pemerintahan Belanda melalui Undang-Undang Hak Milik Perindustrian yang diberlakukan sampai zaman kemerdekaan berdasarkan

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Tahun 1961 peraturan tersebut dikembangkan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Oleh karena undang-undang tersebut kurang memberikan kepastian hukum, undang-undang ini di sempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun tentang Merek. Undang-undang ini lebih menjamin hukum karena memiliki sistem konstitutif atau first to file principle sehingga dapat memberikan perlindungan hukum.

B. CONTENT

Merek yang dibuat oleh pelaku bisnis atau perusahaan bertujuan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi.

Merek dapat disebut sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang berhubungan dengan tujuan pembuatannya. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen.

1 Merek yang dibuat oleh produsen menimbulkan sudut pandang tertentu bagi

konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas produk melalui merek. Oleh karena itu, merek yang berkualitas dan dikenal luas oleh konsumen berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta dibajak. 2 Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menjelaskan bahwa peran merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang baik. Merek dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan asal mula produk, mengetahui kualitas produk, serta keaslian produk.³ Dengan demikian, diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek untuk memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat. Suatu merek menjadi terkenal dan mewujudkan jaminan kualitas dan reputasi suatu produk memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, merek yang telah terkenal akan menjadikan merek tersebut sebagai aset atau kekayaan perusahaan. Akan tetapi, keterkenalan merek tersebut akan mendorong produsen lain untuk menirunya. Persaingan dagang semakin besar sehingga mendorong orang lain melakukan perdagangan dengan jalan pintas (free

riding) terhadap merek terkenal. Tindakan free riding merupakan tindakan yang berusaha untuk membuat, meniru, dan menyamai suatu merek barang atau jasa untuk menumpang keterkenalan suatu merek. Tindakan seperti inilah yang disebut sebagai passing off dengan menggunakan merek dari pihak lain secara melawan hukum. Passing off mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek sesungguhnya seperti menurunnya reputasi perusahaan, omset penjualan yang menurun, dan tuntutan dari konsumen yang merasa tertipu karena kualitas produk tidak sesuai dengan merek aslinya. Merek sebagai karya intelektual memiliki perlindungan hukum sehingga mendorong produsen untuk mencipta dan mengembangkan kreasi masyarakat. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan penanaman modal semakin meningkat serta mendukung iklim investasi. Perlindungan hak atas merek telah diundangkan sejak sebelum kemerdekaan. Undang-undang di bidang merek pertama dilaksanakan pada Pemerintahan Belanda melalui Undang-Undang Hak Milik Perindustrian yang diberlakukan sampai zaman

kemerdekaan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Tahun 1961 peraturan tersebut dikembangkan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Oleh karena undang-undang tersebut kurang memberikan kepastian hukum, dengan adanya undang-undang ini disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun tentang Merek. Undang-undang ini lebih menjamin hukum karena memiliki sistem konstitutif atau first to file principle sehingga dapat memberikan perlindungan hukum. Prinsip inilah yang dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Perubahan undang-undang tersebut dilatar belakangi oleh keikut serataan Indonesia dalam perjanjian Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual of Property Right (TRIPs) sehingga Indonesia harus menyesuaikan ketentuan yang terdapat dalam TRIPs.

Dengan demikian, Indonesia melakukan pembaruan sistem konstitusi. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menjelaskan hak atas merek yaitu: “Hak atas merek adalah

hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Merek jasa telah memiliki hak Merek yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 20 Agustus 2008. Perlindungan Hak Merek kepada pemilik yang diberikan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan ini dapat diperpanjang.

Dengan demikian, bagi pihak lain yang mencoba menggunakan merek yang sama akan ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hak atas merek diberikan kepada pemegang merek setelah memenuhi seluruh prosedur pendaftaran merek. Pendaftaran merek bertujuan memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hak atas merek. Pendaftaran merek merupakan alat bukti yang sah atas merek terdaftar. Pendaftaran merek juga berguna sebagai 7 Muhammad Abdulkadir, 2000,

Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hal:120 8 dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokok yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. 8 Prosedur atau tata cara pendaftaran merek di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diatur dalam Pasal 7. Berdasarkan peraturan undang undang yang dijabarkan, pemberian hak atas merek yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001. Secara garis besar proses pendafratan merek yaitu: (1) mengisi formulir permohonan HKI beserta etiket mereknya, (2) menguasai pendaftaran HKI kepada Konsultan HKI, (3) melakukan pembayaran pendaftaran HKI. Pendaftaran merek dilakukan setelah penerima permohonan pendaftaran merek tersebut . Pengumuman permohonan pendaftaran merek Spesial ini dapat diterbitkan dalam bentuk sertifikat merek. Dengan demikian, merek jasa Spesial memiliki hak atas merek. Hak atas merek yang dimiliki dapat dijadikan sebagai jaminan dan kepastian hukum atau

perlindungan hukum. Bentuk jaminan kepastian perlindungan hukum berupa tanda bukti pendaftaran dalam bentuk sertifikat. Sertifikat berlaku selama sepuluh tahun sejak tanggal 20 Agustus 2008 dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang.

C. CONCLUSION

Pertama, upaya perlindungan hukum dalam penyelesaian pemegang merek, memiliki perlindungan hukum berupa hak merek yang dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat merek dengan nomor IDM000173773. Hal ini berdasarkan Pasal 3 UU nomor 15 tahun 2001. Kesesuaian tersebut dapat dibuktikan dengan penerapan Pasal 7 tentang tata cara permohonan pendaftaran merek sehingga merek memperoleh HKI. Dengan demikian, merek mempunyai perlindungan hak atas merek terhadap penyelesaian sengketa passing off. berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui mediasi yaitu penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dalam upaya

penyelesaian sengketa. Masing-masing pihak menunjuk mediator, para mediator melakukan perundingan 11 secara damai sehingga antar pemilik merek menghasilkan keputusan yang adil dalam penyelesaian sengketa, berupa penghentian penggunaan merek serupa dan mengganti/merubah logo atau merek yang dinilai mirip dengan logo dan merek Dasar pengambilan keputusan kasus sengketa tersebut sesuai dengan penerapan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

D. DISCUSSION

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Merek jasa Spesial Sambal telah memiliki hak Merek yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 20 Agustus 2008. Perlindungan Hak Merek kepada pemilik merek Spesial Sambal diberikan selama 10

tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang. Dengan demikian, bagi pihak lain yang mencoba menggunakan merek yang sama akan ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hak atas merek diberikan kepada pemegang merek setelah memenuhi seluruh prosedur pendaftaran merek. Prosedur atau tata cara pendaftaran merek di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diatur dalam Pasal 7. Berdasarkan peraturan undangundang yang dijabarkan, pemberian hak atas merek Spesial Sambal dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001. Secara garis besar proses pendafratan merek Spesial Sambal yaitu: (1) mengisi formulir permohonan HKI beserta etiket mereknya, (2) mengkuasakan pendaftaran HKI kepada Konsultan HKI, (3) melakukan pembayaran pendaftaran HKI. Pendaftaran merek dilakukan setelah penerimaan permohonan pendaftaran merek. Pengumuman permohonan pendaftaran merek Spesial

Sambal diterbitkan dalam
bentuk sertifikat merek.

E. REFERENCE

- [1] O. M. Febriani and A. S. Putra, "Sistem Informasi Monitoring Inventori Barang Pada Balai Riset Standardisasi Industri Bandar Lampung," *J. Inform.*, vol. 13, no. 1, pp. 90–98, 2014.
- [2] A. S. Putra, "Paperplain: Execution Fundamental Create Application With Borland Delphi 7.0 University Of Mitra Indonesia," 2018.
- [3] A. S. Putra, "2018 Artikel Struktur Data, Audit Dan Jaringan Komputer," 2018.
- [4] A. S. Putra, "ALIAS MANAGER USED IN DATABASE DESKTOP STUDI CASE DB DEMOS."
- [5] A. S. Putra, "COMPREHENSIVE SET OF PROFESSIONAL FOR DISTRIBUTE COMPUTING."
- [6] A. S. Putra, "DATA ORIENTED RECOGNITION IN BORLAND DELPHI 7.0."
- [7] A. S. Putra, "EMBARCADERO DELPHI XE 2 IN GPU-POWERED FIREMONKEY APPLICATION."
- [8] A. S. Putra, "HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM DUNIA TEKNOLOGY BERBASIS REVOLUSI INDUSTRI 4.0."
- [9] A. S. Putra, "IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANGAN UU. NO 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI BERBASIS INFORMATION TECHNOLOGY."
- [10] A. S. Putra, "IMPLEMENTATION OF PARADOX DBASE."
- [11] A. S. Putra, "IMPLEMENTATION OF TRADE SECRET CASE STUDY SAMSUNG MOBILE PHONE."
- [12] A. S. Putra, "IMPLEMENTATION PATENT FOR APPLICATION WEB BASED CASE STUDI WWW. PUBLIKLAMPUNG.COM."
- [13] A. S. Putra, "IMPLEMENTATION SYSTEM FIRST TO INVENT IN DIGITALLY INDUSTRY."
- [14] A. S. Putra, "MANUAL REPORT & INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT BORLAND DELPHI 7.0."
- [15] A. S. Putra, "PATENT AS RELEVAN SUPPORT RESEARCH."
- [16] A. S. Putra, "PATENT FOR RESEARCH STUDY CASE OF APPLE. Inc."
- [17] A. S. Putra, "PATENT PROTECTION FOR APPLICATION INVENT."
- [18] A. S. Putra, "QUICK REPORT IN PROPERTY PROGRAMMING."
- [19] A. S. Putra, "REVIEW CIRCUIT LAYOUT COMPONENT REQUIREMENT ON ASUS NOTEBOOK."
- [20] A. S. Putra, "REVIEW

- TRADEMARK PATENT FOR INDUSTRIAL TECHNOLOGY BASED 4.0.”
- [21] A. S. Putra, “TOOLBAR COMPONENT PALLETTE IN OBJECT ORIENTED PROGRAMMING.”
- [22] A. S. Putra, “WORKING DIRECTORY SET FOR PARADOX 7.”
- [23] A. S. Putra, “ZQUERY CONNECTION IMPLEMENTED PROGRAMMING STUDI CASE PT. BANK BCA Tbk.”
- [24] A. S. Putra, D. R. Aryanti, and I. Hartati, “Metode SAW (Simple Additive Weighting) sebagai Sistem Pendukung Keputusan Guru Berprestasi (Studi Kasus: SMK Global Surya),” in *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 2018, vol. 1, no. 1, pp. 85–97.
- [25] A. S. Putra and O. M. Febriani, “Knowledge Management Online Application in PDAM Lampung Province,” in *Prosiding International conference on Information Technology and Business (ICITB)*, 2018, pp. 181–187.
- [26] A. S. Putra, O. M. Febriani, and B. Bachry, “Implementasi Genetic Fuzzy System Untuk Mengidentifikasi Hasil Curian Kendaraan Bermotor Di Polda Lampung,” *SIMADA (Jurnal Sist. Inf. dan Manaj. Basis Data)*, vol. 1, no. 1, pp. 21–30, 2018.
- [27] A. S. Putra, H. Sukri, and K. Zuhri, “Sistem Monitoring Realtime Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Dengan Konsep Jaringan Sensor Nirkabel,” *IJEIS (Indonesian J. Electron. Instrum. Syst.*, vol. 8, no. 2, pp. 221–232.
- [28] D. P. Sari, O. M. Febriani, and A. S. Putra, “Perancangan Sistem Informasi SDM Berprestasi pada SD Global Surya,” in *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 2018, vol. 1, no. 1, pp. 289–294.